

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan ekonomi secara fundamental merupakan kegiatan yang dilakukan dalam suatu wilayah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Selain itu pembangunan ekonomi juga mengubah pola perilaku masyarakat dalam kegiatan perekonomian. Hal tersebut menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi merupakan upaya yang dilakukan suatu wilayah untuk mengubah perilaku masyarakat untuk meningkatkan taraf hidupnya.

Pembangunan ekonomi tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat di wilayah tertentu tetapi pembangunan dilakukan secara merata. Tujuan pembangunan ekonomi gagal apabila pembangunan ekonomi mengakibatkan pendapatan masyarakat tidak terdistribusi secara merata. Hal ini membuat hanya beberapa kelompok atau segolongan kecil masyarakat yang menikmati hasil pembangunan ekonomi.

Dalam pembangunan ekonomi memiliki indikator untuk mengetahui keberhasilan ekonomi yaitu pertumbuhan ekonomi. Secara umum pertumbuhan ekonomi merupakan sebuah peningkatan jumlah produksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian. Pertumbuhan ekonomi dapat diukur dengan menggunakan data Produk Domestik Bruto (GDP) dari tahun ke tahun. Hal tersebut menjelaskan bahwa pembangunan ekonomi ialah upaya peningkatan perekonomian melalui hasil atau jumlah pertambahan output barang yang dihasilkan.

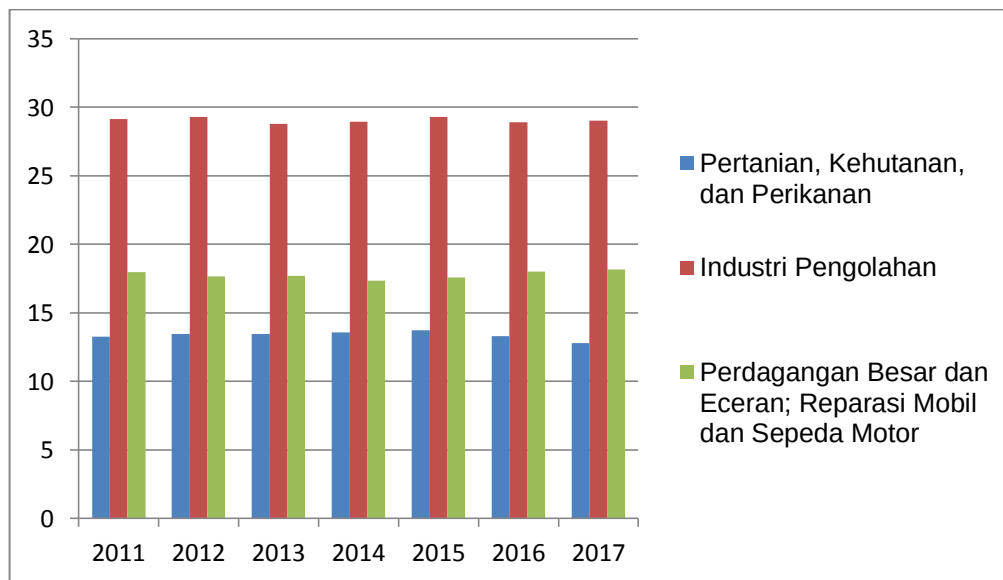
Selain memperhatikan pertumbuhan ekonomi, hal yang harus diperhatikan dalam pembangunan ekonomi adalah masalah ketimpangan distribusi pendapatan. Jika suatu daerah mengalami laju pertumbuhan yang tinggi tetapi ketimpangan distribusi pendapatan masih tinggi membuat pembangunan tersebut tidak sebanding.

Fenomena yang sering terjadi dalam pembangunan ekonomi yaitu perbedaan karakteristik struktur ekonomi dan potensi yang dimiliki setiap wilayah. Perbedaan karakteristik disebabkan adanya kondisi daerah yang sangat beragam. Keberagaman tersebut meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, ekonomi, sosial, jumlah penduduk, sarana dan prasarana dan letak geografi.

Ketimpangan pendapatan yang besar merupakan masalah yang sering dianggap serius terjadi dinegara yang sedang berkembang termasuk Indonesia. Pada era pemerintahan orde baru yakin bahwa proses pembangunan yang hanya terpusat diwilayah jawa dan sektor – sektor tertentu yang memiliki nilai tambah yang tinggi akan menghasilkan *trickle down effect*. Maksud hal tersebut adalah hasil pembangunan melalui capaian laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi di sektor – sektor tersebut akan menyebar ke sektor – sektor dan wilayah lainnya (Kembaw Dkk, 2015). Berdasarkan hal tersebut, jika *trickle down effect* terjadi maka pertumbuhan ekonomi dapat dinikmati semua kelompok penduduk termasuk penduduk miskin melalui penciptaan lapangan kerja baru serta memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kesejahteraan.

Saat ini industrialisasi menjadi salah satu strategi pembangunan yang diterapkan untuk meningkatkan perekonomian di wilayah berkembang (Jhingan,

2012). Sektor industri juga diyakini mampu mengatasi permasalahan ekonomi seperti tingkat kesejahteraan. Selain itu sektor industri merupakan sektor utama (*leading sector*) yang mampu mendorong sektor lainnya seperti sektor jasa dan pertanian. Selain itu sektor industri memiliki jumlah kontribusi yang besar dalam pertambahan PDRB.

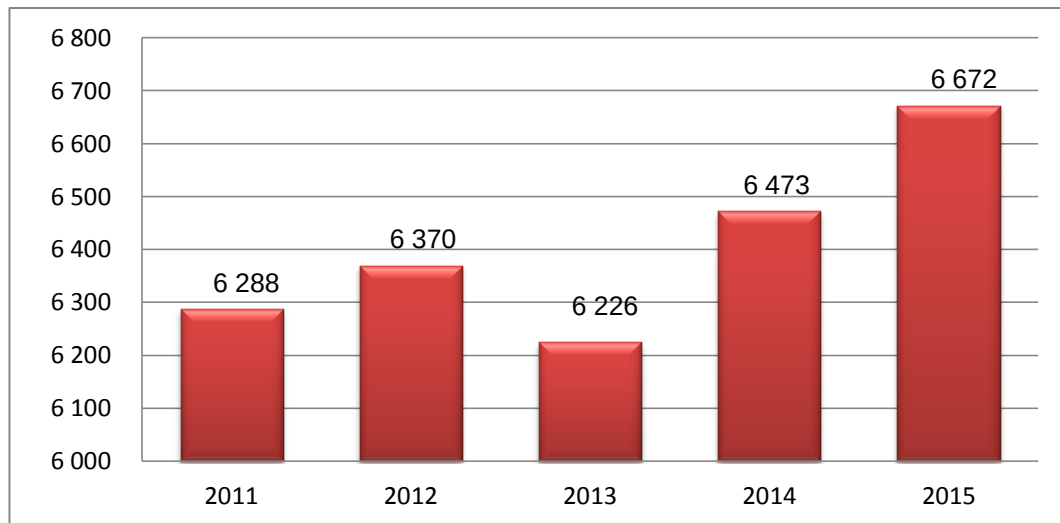


Gambar 1.1 Kontribusi Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Tiga Sektor (Persen) Provinsi Jawa Timur

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur (data diolah), Tahun 2018

Dari grafik 1.1 sektor industri pengolahan Provinsi Jawa Timur memiliki Kontribusi yang cukup besar dibandingkan sektor lainnya terhadap Produk Domestik Regional Bruto dibandingkan sektor lainnya. Besaran kontribusi industri di Jawa timur dari tahun 2011 hingga tahun 2017 tingkat kontribusi sektor industri memiliki rata – rata sebesar 29%, meskipun terjadi penurunan 0,49% pada tahun 2013 yaitu sebesar 28,79% . Kedua adalah sektor perdagangan besar dan eceran yaitu dari 2011 hingga tahun 2017 memiliki kontribusi sebesar 17%. Ketiga yaitu sektor pertanian, kontribusi sektor pertanian dari tahun 2011 hingga tahun

2017 memiliki rata-rata sebesar 13% . Berdasarkan hal tersebut sektor industri memiliki peranan penting terhadap kondisi perekonomian di Jawa Timur.



Gambar 1.2 Jumlah Industri Pengolahan Provinsi Jawa Timur

Sumber: Badan Pusat Statistik, Tahun 2018

Berdasarkan gambar 1.2 jumlah industri sedang dan besar di Jawa Timur memiliki jumlah diatas enam ribu. Akan tetapi jika dilihat perkembangan dari tahun 2011 hingga tahun 2015 jumlah industri sempat mengalami penurunan pada tahun 2013 yaitu dari 6.370 industri menjadi 6.226 industri. Namun hal tersebut tidak bertahan lama dan mengalami peningkatan dari tahun 2014 sampai 2015. Pada tahun 2014 berjumlah 6.473 dan mengalami peningkatan kembali 6.672. tentu peningkatan jumlah industri di Jawa Timur di harapkan mampu mengurangi permasalahan ekonomi.

Namun, industri cenderung beraglomerasi di daerah yang memiliki sumber daya dan potensi untuk memenuhi kebutuhan untuk berproduksi. Menurut Hirschman (dalam Kuncoro, 2004) perbedaan antar wilayah tersebut yang menjadi hambatan dalam pemerataan pembangunan ekonomi. Hal ini karena terjadi konsentrasi kegiatan ekonomi yang berdampak terhadap meningkatnya pertumbuhan ekonomi di beberapa wilayah yang memiliki kekayaan alam yang

melimpah. Sedangkan wilayah lainya hanya berharap untuk menerima dampak sebar (*spred effect*) dari daerah yang memiliki pembangunan ekonomi yang terkonsentrasi dibeberapa wilayah

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Tahun 2011 hingga tahun 2031 pasal 80 ayat 1 menegaskan bahwa kawasan yang digunakan untuk industri memiliki lahan sekurang-kurangnya 69. 288 Ha yang meliputi kawasan industri, kawasan peruntukan industri diluar kawasan industri dan sentra industri. Berikut gambar pengembangan kawasan industri di Kabupaten dan Kota Provinsi jawa timur.

Tabel 1.1 Pengelompokan Kawasan Industri di Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Timur

Kawasan Industri	Kawasan Peruntukan Industri Di Luar Kawasan
a. Kabupaten Bangkalan b. Kabupaten Banyuwangi c. Kabupaten Gresik d. Kabupaten Jombang e. Kabupaten Lamongan f. Kabupaten Malang g. Kabupaten Mojokerto h. Kabupaen Pasuruan i. Kabupaten Probolinggo j. Kabupatn Tuban k. Kabupaten Sidoarjo l. Kota Madiun m. Kota Surabaya	a. Kabupaten Bangkalan b. Kabupaten Bojonegoro c. Kabupaten Gresik d. Kabupaten Jember e. Kabupaten Jombang f. Kabupaten Lamongan g. Kabupaten Madiun h. Kabupaten Malang i. Kabupaten Mojokerto j. Kabupaten Nganjuk k. Kabupaten Ngawi l. Kabupaten Pasuruan m. Kabupaten Probolinggo n. Kabupaten Sidoarjo o. Kabupaten Situbondo p. Kabupaten Tuban q. Kota Kediri r. Kota Madiun s. Kota Surabaya

Sumber: Peraturan Daerah Provinsi Jawa tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Tahun 2011 – 2031

Pada gambar 1.3 dapat dijelaskan bahwa pengembangan kawasan industri yang telah telah diatur melalui peraturan daerah tersebut hanya terdiri 13 kabupaten dan kota sedangngkan untuk pengembangan kawasan industri

peruntukan industri diluar kawasan hanya terdiri dari 19 kabupaten dan kota. Namun untuk sentra industri dilakukan diseluruh kabupaten dan kota. Adanya pengembangan kawasan tersebut akan terjadi aglomerasi ekonomi atau kegiatan ekonomi hanya muncul di beberapa wilayah. Hal ini bertujuan untuk memberikan dampak sebar ke wilayah sekitarnya. Menurut damayanti (2007) menjelaskan bahwa tingkat aglomerasi industri yang terjadi memiliki dampak sebar (*spread effect*) atau berdampak positif pada ketimpangan regional. Hal ini disebabkan karena terjadinya arus urbanisasi yang dapat mengabsorsikan tenaga kerja yang terampil sehingga mampu mengurangi pengangguran diwilayah terbelakang.

Dari uraian tersebut penyusun tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai ketimpangan pendapatan se Kabupaten dan kota provinsi jawa timur yang diakibatkan oleh terjadinya aglomerasi industri. Dengan demikian penulis mengambil judul: **ANALISIS TINGKAT AGLOMERASI INDUSTRI DAN KETIMPANGAN PENDAPATAN Se KABUPATEN DAN KOTA PROVINSI JAWA TIMUR.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas yang telah dipaparkan maka penulis mendapatkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kondisi aglomerasi industri Kabupaten dan Kota Se Provinsi Jawa Timur?
2. Bagaimana kondisi ketimpangan pendapatan kabupaten dan kota Se Provinsi Jawa Timur?
3. Bagaimana dampak Aglomerasi industri terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Jawa Timur?

1.3 Batasan masalah

Masalah ketimpangan pembangunan terjadi dan berlangsung dalam berbagai bentuk, dan berbagai aspek. Sehingga dalam melakukan penelitian dibutuhkan batasan masalah agar pembahasan tidak terlalu melebar. Batasan masalah dalam penelitian ini dengan adanya perbedaan potensi dan sumber daya setiap wilayah di Jawa Timur industri cenderung beraglomerasi. Hal ini cenderung berpotensi terjadinya ketimpangan Pendapatan. Maka dalam penelitian ini mengukur tingkat aglomerasi dan ketimpangan pendapatan yang terjadi di setiap Kabupaten dan Kota di Jawa Timur.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan hasil uraian latar belakang dan rumusan masalah serta batasan yang akan diteliti, maka tujuan yang akan dicapai peneliti yaitu:

1. Untuk mengetahui kondisi dan besaran aglomerasi industri yang terjadi di Kabupaten/Kota di Jawa Timur.
2. Untuk mengetahui kondisi dan besaran ketimpangan pendapatan yang terjadi Kabupaten/Kota di Jawa Timur.
3. Untuk mengetahui dampak sebar aglomerasi industri terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Jawa Timur

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat secara teoritis dan praktis yang akan diberikan dalam penelitian mengenai besaran analisis aglomerasi industri dan ketimpangan pendapatan di Kabupaten/Kota di Jawa Timur.

1.5.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur mengenai aglomerasi dan ketimpangan pendapatan, serta pengaruhnya

aglomerasi industri terhadap ketimpangan pendapatan Kabupaten dan Kota se Jawa timur.

1.5.2 Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah Daerah dan Provinsi

Dapat digunakan untuk pertimbangan perencanaan bagi Pemerintah Daerah baik tingkat provinsi maupun di Kabupaten dan Kota di Jawa Timur.

b. Bagi Pembaca dan Masyarakat Umum

Hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai sumber informasi data sekunder. dan memberikan wawasan pada masyarakat mengenai aglomerasi industri dan ketimpangan pendapatan.